



Berpeluang Tampil Lagi di Malioboro

■ Pemkot Yogya Minta Pengamen Angklung Kolaborasikan Musik Jawa

YOGYA, TRIBUN - Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta meminta pertunjukan angklung di Malioboro perlu ditata dan dimodifikasi agar dapat tampil kembali di kawasan sumbu filosofi. Untuk saat ini, pelaku kesenian angklung dilarang untuk tampil di sepanjang kawasan Malioboro.

Pelarangan didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) nomor 3/SE/1/2022 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.

Hal ini juga didasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan) Kota Yogyakarta No. 430/1.131/SE.Disbud/2022 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.

"(Modifikasi) dari sisi tampilannya, perform orang yang main, musiknya kemudian kami beri kolaborasi dengan musik ala Jawa, gak semata-mata (hanya angklung). Kami akomodasi mungkin diberi bonang, saron apa pun yang bernuansa Jogja," ujar Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogya, Ekwanto, Kamis (23/3).

Komunitas angklung di Malioboro lantas dikurasi dan saat ini masih berproses. Setelah itu, mereka bisa melakukan pertunjukan di Teras Malioboro 1 dan 2 dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selama berproses, komunitas angklung belum diperbolehkan melakukan pertunjukan di Malioboro.

"Ya betul (*perform* sesuai jadwal). Masih berproses jadi memang belum semua, masih proses kurasi. Yang sudah kami kurasi ini mungkin ada enam apa tujuh," ujarnya.

Dia menargetkan, komunitas angklung yang sudah dikurasi dan dimodifikasi bisa tampil untuk menyambut libur lebaran pada April mendatang. Sebab bisa menjadi salah satu daya tarik wisata di Yogya. "Secepatnya. Kalau memungkinkan pas lebaran itu," ujarnya.

Penjabat Wali Kota Yogya, Sumadi, menjelaskan pihaknya pun sudah menginstruksikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, untuk melakukan rangkaian kurasi. Sehingga, nantinya pengamen angklung bisa kembali tampil, namun di tempat khusus yang disediakan di Teras Malioboro 1 dan 2, bukan di kawasan pedestrian lagi.

"Kalau itu, kita sudah minta kepada teman-teman di UPT untuk mengkurasi. Mudah-mudahan nanti teman-teman angklung dari beberapa komunitas itu dapat memahami," ujarnya.

Bukan tanpa alasan, langkah tersebut diterapkan supaya aktivitas di sepanjang sumbu filosofi terkontrol serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan para pejalan kaki. Sehingga, setiap pengamen yang hendak tampil di Malioboro pun harus dipastikan terlebih dahulu bentuk dan kualitas dari sajianya.

"Pemda DIY punya niatan yang sangat luar biasa, bagaimana di sumbu filosofi tercipta keamanan dan kenyamanan. Tapi, ini bukan berarti teman-teman pengamen angklung membuat situasi yang nganu (mengganggu) itu tidak, ya," tegasnya.

Oleh karena ya, Pj Wali Kota pun berharap pengertian dari para pengamen angklung, untuk menanti proses kurasi yang tengah ditempuh

PROSES KURASI

- Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta meminta penataan pertunjukan angklung.
- Saat ini pelaku kesenian angklung dilarang tampil di sepanjang kawasan Malioboro.
- Pengamen angklung juga diminta kolaborasi musik dengan gamelan.
- Penampilan para pengamen ditargetkan untuk menyambut lebaran.

UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Meskipun, ia menyadari, protes yang berulang kali dilakukan pengamen angklung sangat berkaitan dengan kebutuhan hidupnya. "Kita sangat berharap digelar di tempat lain dulu sementara (di luar Malioboro). Walaupun saya juga menyadari, itu persoalan makan. Tetapi, Yogya sudah mengajukan (sumbu filosofi) delapan tahun dan ini sudah dilakukan verifikasi," cetusnya.

Bahkan, tambahnya, pemerintah pusat pun menaruh perhatian dalam upaya realisasi sumbu filosofi sebagai warisan budaya tak benda dunia tersebut. Oleh sebab itu, sembari menunggu hasil verifikasi UNESCO yang diharapkan bisa keluar per 2023, semua pihak diharapkan bisa saling menahan diri dalam beraktivitas di sana.

"Kalau sudah ada keputusan itu menjadi warisan budaya tak benda, kita nanti bisa menikmati hasilnya. Memang, target waktu tidak ada, tapi kita tunggu dulu kurasi dari UPT yang harus kita koordinasikan dengan Pemda DIY," pungkasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005